



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROJIKIN
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. PALMERAH
3. NHK : 229082

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.283.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 293 m2/293 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 586.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/150 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah Seluas 115 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 287.500.000
5. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **23.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA (GL.100) SEPEDA MOTOR Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **2.050.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.763.933
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.170.000.000
Sub Total	Rp.	3.520.813.933
III. HUTANG	Rp.	1.976.258.679
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.544.555.254

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.